

KEPEMILIKAN MANAJERIAL DALAM AGENCY THEORY

Agus Arwani

M. Nur Ramadhan

Venny Restiara

Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Pekalongan

agus.arwani@iainpekalongan.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait *agency theory* (teori keagenan) maupun *agency problem* (konflik keagenan) dalam hubungan keagenan. *Agency theory* menjelaskan tentang pemisahan antara fungsi pengelola (oleh *agent*) dan fungsi kepemilikan (oleh *principal*). *Principal* disini merupakan pemegang saham, sedangkan *agent* merupakan manajer. Dalam hubungan keagenan tentunya memiliki tujuan yaitu meningkatkan kinerja perusahaan. Akan tetapi seringkali manajer melakukan tindakan yang bertentangan dengan pemegang saham, hal ini yang menyebabkan terjadinya konflik keagenan.

Kata kunci : *agency theory*, *agency problem*, kepemilikan manajerial

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu perusahaan haruslah dikelola secara profesional. Adakalanya pemilik perusahaan tidak mengelola perusahaan sendiri akan tetapi menyerahkan kepada pihak lain yang berkompeten. Perusahaan dikatakan memiliki tujuan yang bermacam-macam. Ada yang mengatakan bahwa perusahaan berfokus pada pencapaian keuntungan atau laba maksimal atau laba yang sebesar-besarnya. Ada pula yang mengatakan perusahaan bertujuan untuk memakmurkan kepentingan pemiliknya, dan ada pula yang berpendapat bahwa perusahaan harus dapat mencapai kesejahteraan masyarakat sebagai tanggung jawab sosialnya. Dari semua pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ingin mencapai satu tujuan yaitu memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri (*value of the firm*).¹

Perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan (*agent*) dan pemegang saham (*principal*). Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami hubungan antara agent dan principal. Hubungan keagenan yang merupakan salah satu bentuk interaksi sosial yang paling tua dan umum muncul ketika ada pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan, dimana salah satu pihak (*agent*) bertindak sebagai perwakilan pihak lain (*principal*) dalam pengambilan keputusan.² Hal tersebut dapat menimbulkan *agency problem* karena adanya perbedaan kepentingan.³ Hubungan kontraktual ini agar dapat berjalan lancar,

¹Amanda Wongso, 'PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI AGENSI DAN TEORI SIGNALING', 6.

²Shiela Liviani, Putu Anom Mahadwartha, and Liliana Inggrit Wijaya, 'UJI MODEL KESEIMBANGAN TEORI KEAGENAN: PENGARUH KEBIJAKAN UTANG DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP KEPEMILIKAN MANAJERIAL', 11.1 (2016), 19.

³Liviani, Mahadwartha, and Wijaya.

prinsipal mendelegasikan otoritas pembuatan keputusan kepada agen dan hubungan ini juga perlu diatur dalam suatu kontrak yang biasanya menggunakan angka-angka akuntansi yang dinyatakan dalam laporan keuangan sebagai dasarnya. Pendesainan kontrak yang tepat untuk menyelaraskan kepentingan agen dan prinsipal dalam hal terjadi konflik kepentingan inilah yang merupakan inti dari teori keagenan.⁴

Konflik terjadi karena setiap manusia adalah makhluk ekonomi yang mempunyai sifat dasar mementingkan dirinya sendiri. Principal dan agent mempunyai tujuan yang berbeda dan keduanya menginginkan tujuannya dapat terpenuhi. Akibatnya terjadi konflik kepentingan. Principal ingin pengembalian yang lebih besar dan secepatnya atas investasi yang diberikan sedangkan agent menginginkan kepentingan mereka diakomodasi dengan pemberian insentif sebesar-besarnya atas kinerja perusahaan.

Eisenhardt dalam Siagian (2011:11) menyatakan bahwa teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu : (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri, (2) manusia memiliki daya piker terbatas mengenai persepsi masa mendatang, (3) manusia selalu menghindari resiko. Dari asumsi tersebut dapat dilihat bahwa agency problem yang sering terjadi antara agent dan principal dipicu adanya sifat dasar tersebut. Bila dihubungkan dengan teori Jensen dan Meckling, manajer dalam mengelola perusahaan cenderung mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan untuk meningkatkan nilai perusahaan, seharusnya sebagai manajer meningkatkan kemakmuran pemilik melalui peningkatan nilai perusahaan.

Dengan hal ini terdapat dua kepentingan yang berbedadidalam perusahaandimanamasing-masing pihakberusahauntukmencapai kemakmuryang dikehendaki, sehinggamuncullahinformasiasimetriantara agent denganprincipal. Pemisahan antara fungsi kepemilikan dengan fungsi

⁴Afridian Wirahadi Ahmad and Yossi Septriani, 'Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Mengurangnya', *Jurnal Akuntansi*, 3, 10.

pengelolaan pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang telah *go public* untuk kelancaran menjalankan usaha, supaya kinerja perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga tercapai tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan nilai perusahaan melalui peningkatan kemakmuran pemilik atau para pemegang saham.⁵

Pemisahan kepemilikan dan pengendalian dapat menyebabkan manajer melakukan tindakan yang menyimpang. Contohnya ketika seorang manajer melakukan tindakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini bisa saja terjadi sehingga menyebabkan terjadinya konflik keagenan (*agency problem*) Menurut Brigham dan Daves (2004), konflik keagenan terjadi ketika manajer memiliki kurang dari seratus persen kepemilikan saham perusahaan.⁶ Semakin besar suatu perusahaan maka semakin besar potensial terkena *agency problem*. Manajer memiliki kecenderungan untuk melakukan konsumsi atas keuntungan tambahan secara berlebihan. Menurut Emeryet.al (2004:379),*agencyproblem* dapat menimbulkan biyakeagenan,yaitu biayayang timbulagar manajemen bertindak selaras dengan tujuan pemilik perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan penyelarasan kepentinganantara manajemen dengan pemegangsaham agar terciptatujuanyangsama.

⁵R Anastasia Endang Susilawati, 'PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PERUSAHAAN';, 17.

⁶Sri Sudarsi, 'DAMPAK KEPEMILIKAN MANAGERIAL, LARGE EXTERNAL SHAREHOLDERS TERHADAP STRUKTUR MODAL DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN', 15.1 (2008), 16.

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan agency theory?
2. Bagaimana keterkaitan antara kepemilikan manajerial dalam agency theory

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui maksud dari agency theory.
2. Untuk mengetahui keterkaitan kepemilikan manajerial dalam agency theory.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan menggunakan analisis. Metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan berupa buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Teori Keagenan (Agency Theory)

Jensen dan Meckling (1976) menggarisbawahi tiga teori, yang selanjutnya menjadi referensi pengembangan riset akuntansi seluruh dunia yaitu : teori hak atas kekayaan, keagenan dan teori keuangan untuk mengembangkan teori struktur kepemilikan perusahaan. Teori-teori ini memberikan penerangan yang lebih jelas tentang definisi perusahaan (*firm*), pemisahan kepemilikan dan pengendalian (*separation of ownership and control*), *social responsibility*, definisi fungsi objektif korporat (*corporate objective function*).⁷

Teori agency menekankan pada hubungan keagenan (*agency relationship*) yang terjadi ketika satu pihak (*principals*) mendelegasikan pekerjaannya pada pihak lain (*agen*) yang melaksanakan pekerjaan tersebut. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai suatu kontrak dimana satu atau lebih *principals* (pemilik) menggunakan orang lain atau *agen* (*manajer*) untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Di dalam teori keagenan, yang dimaksud *principals* adalah pemegang saham/pemilik/investor, sedangkan *agen* adalah manajemen yang mengelola harta pemilik yang ada di perusahaan.⁸

Dalam Agency Theory terdapat dua pihak yang melakukan kontrak yaitu *agent* dan *principal*. Kontrak tersebut bisa dalam bentuk: (1) kontrak

⁷Achmad Uzaimi, 'TEORI KEAGENAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 1.1 (2017), 71–78
<<https://doi.org/10.31629/jiafi.v1i1.1240>>.

⁸Muntahanah, 'Manajemen Konflik Agency Kaitannya Dengan Nilai Perusahaan'.

kerja dan (2) kontrak pinjaman. Kontrak kerja dilakukan oleh pemilik perusahaan dan top manajer perusahaan, sedangkan kontrak pinjaman dilakukan oleh manajer perusahaan dan pemberi pinjaman.⁹Wolketal.(1992)menjelaskan bahwa agencytheoryperusahaan digambarkan sebagai lokus (titik temu) hubungan keagenan antara pemilik perusahaan (principal) dan manajemen perusahaan(agent) dan berusaha memberi suatu pemahaman perilaku organisasional dengan mengungkapkan bagaimana pihak-pihak yang terlibat dalam hubungan keagenan dalam perusahaan berusaha untuk memaksimalkan utility mereka.

B. Masalah Keagenan (Agency Problem)

Hubungan antaramanajemen dengan pemilik perusahaan merupakan paradigma hubungan principal-agent, dan pemilik perusahaan sebagai principal memberikan kepercayaan (secara formal dalam bentuk kontrak hubungan kerja) kepada manajemen (agent) yang memberikan jasa manajerialnya. Dalam agency theory terdapat dua pihak yang melakukan kontrak yaitu agent dan principal. Masing-masing individu diasumsikan semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan diantara principal dan agent (Scott, 1997).

Pihak principal termotivasi mengadakan kontrak untuk mensejahterakan dirinya dengan tingkat profitabilitas yang selalu meningkat, sedang agent termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologisnya antara lain dalam hal memperoleh investasi, pinjaman, maupun kontrak kompensasi. Agent mempunyai lebih banyak informasi mengenai perusahaan daripada principal sehingga dengan informasi asimetri yang dimilikinya agent dapat lebih fleksibel mempengaruhi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan kepentingannya.

⁹Nur Fadrijh Asyik, 'PERSPEKTIF AGENCY THEORY: PENGARUH INFORMASI ASIMETRI TERHADAP MANAJEMEN LABA (Menggunakan Pendekatan Agency Framework)', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 4.1 (2016), 29 <<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2000.v4.i1.1898>>.

Jensen dan Meckling (1976), menyatakan bahwa agency problem akan terjadi jika proporsi kepemilikan manajer atas saham perusahaan kurang dari 100% sehingga cenderung untuk bertindak untuk mengejar kepentingan dirinya dan sudah tidak berdasar maksimalisasi nilai perusahaan dalam pengambilan keputusan pendanaan. Menurut Michael C. Jensen dan Meckling yang dimaksud dengan konflik antar kelompok atau agency problem adalah konflik yang timbul antara pemilik, karyawan dan manajer perusahaan dimana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Dalam konteks manajemen keuangan, hubungan agen yang utama adalah : 1) antara pemegang saham dan manajer, 2) antara manajer dan pemberi kredit.

Masalah keagenan menurut Demsey dan Lafer (1993) banyak dipengaruhi oleh *insider ownership*. Insider ownership adalah pemilik perusahaan sekaligus menjadi pengelola perusahaan. Semakin besar *insider ownership*, perbedaan kepentingan antara pemegang saham (pemilik) dengan pengelola perusahaan semakin kecil, mereka akan bertindak lebih hati-hati karena mereka akan ikut menanggung konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Apabila *insider ownership* kecil, yang berarti hanya sedikit jumlah pemegang saham yang ikut terlibat dalam mengelola perusahaan maka semakin tinggi kemungkinan munculnya masalah keagenan karena perbedaan kepentingan antara pemilik saham dengan pengelola perusahaan semakin besar.

Agency Problem juga muncul antara kreditor (pemberi utang), misalnya antara pemegang obligasi perusahaan dengan pemegang saham yang diwakili oleh manajemen perusahaan. Konflik muncul jika: (1) manajemen mengambil proyek-proyek yang risikonya lebih besar daripada yang diperkirakan oleh kreditor, atau (2) perusahaan meningkatkan jumlah utang hingga mencapai tingkatan yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan

kreditor.¹⁰ Kedua tindakan tersebut dapat merugikan kreditor jika perusahaan mengambil proyek yang terlalu berisiko karena hal ini akan meningkatkan risiko kebangkrutan perusahaan.

C. Biaya Keagenan (Agency Cost)

Biaya keagenan (agency cost) dapat disebabkan oleh mekanisme pengawasan yang dilakukan untuk mengurangi konflik keagenan (agency problem). Biaya agensi terjadi ketika kecurigaan muncul antara kedua pihak.¹¹ Dengan kata lain apabila konflik keagenan (agency problem) suatu perusahaan besar, maka biaya keagenan (agency cost) yang harus dikeluarkan juga besar.

Biaya keagenan menurut jenis biayanya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:¹²

1. Biaya pemantauan (monitoring cost/activities) oleh prinsipal: biaya pengukuran dan evaluasi kinerja agen, biaya perencanaan dan penerapan indeks kompensasi manajer, biaya perencanaan dan penegakan peraturan/kebijakan perilaku khusus, biaya perekrutan dan penggantian manajer, dan biaya terkait ekuitas pihak luar.
2. Biaya pengikatan (bounding cost) oleh agen: manfaat bagi manajer dalam kaitan dengan uang (pecuniary) dan tidak terkait uang (non pecuniary), biaya strukturisasi keuangan, biaya terkait covenant dan pembatasan perilaku manajerial oleh pihak luar, biaya reorganisasi, kas yang ditahan, serta biaya kerugian investasi.
3. Kerugian residual (residual loss) yang mungkin ada: risiko yang ditanggung atas hutang belum dilunasi dan biaya kebangkrutan. Besaran biaya keagenan ini dapat dibatasi dengan kualitas pengendalian oleh

¹⁰Sukardi Kodrat David and Herdinata Christian, *Manajemen Keuangan Based on Empirical Research*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009).

¹¹Félix Zogning, 'Agency Theory: A Critical Review', *European Journal of Business and Management*, 2017, 8.

¹²P.B. Hadiprajitno, 'Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, Dan Biaya Keagenan Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 9.2 (2013), 97–127.

pemilik dan pihak ketiga yang menerima delegasinya (seperti bank) yang memantau tindakan manajer dari luar.

D. Asimetri Informasi

Agent atau manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan *Principal* atau pemegang saham. Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberi tahu kondisi perusahaan kepada pemilik. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Laporan keuangan dimaksudkan untuk digunakan oleh berbagai pihak, termasuk manajemen perusahaan itu sendiri. Namun yang paling berkepentingan dengan laporan keuangan sebenarnya adalah para pengguna eksternal. Laporan keuangan tersebut penting bagi para pengguna eksternal terutama sekali karena kelompok ini berada dalam kondisi yang paling besar ketidakpastiannya. Berbeda dengan pengguna internal yang memiliki kontak langsung dengan entitas atau perusahaannya dan mengetahui peristiwa-peristiwa signifikan yang terjadi, sehingga tingkat ketergantungannya terhadap informasi akuntansi tidak sebesar para pengguna eksternal.

Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*).¹³Adanya asimetri informasi memungkinkan adanya konflik yang terjadi antara *principal* dan *agent* untuk salingmencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingan sendiri.

Menurut Scott (2000), terdapat dua macam asimetri informasi yaitu:

¹³Oyong Lisa, 'ASIMETRI INFORMASI DAN MANAJEMEN LABA: SUATU TINJAUAN DALAM HUBUNGAN KEAGENAN', 2.1 (2012), 8.

1. Adverse selection, yaitu bahwa para manajer serta orang-orang dalam lainnya biasanya mengetahui lebih banyak tentang keadaan dan prospek perusahaan dibandingkan investor pihak luar. Dan fakta yang mungkin dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pemegang saham tersebut tidak disampaikan informasinya kepada pemegang saham.
2. Moral hazard, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer tidak seluruhnya diketahui oleh pemegang saham maupun pemberi pinjaman. Sehingga manajer dapat melakukan tindakan diluar pengetahuan pemegang saham yang melanggar kontrak dan sebenarnya secara etika atau norma mungkin tidak layak dilakukan.

E. Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan merupakan berbagai macam pola dan bentuk dari kepemilikan suatu perusahaan atau persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal¹⁴ atau dengan kata lain struktur kepemilikan adalah perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (insider) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor. Pemegang saham terdiri dari internal dan eksternal. Pemegang saham internal merupakan pemilik saham sekaligus yang terlibat di dalam struktur organisasi perusahaan, yang artinya orang tersebut juga melaksanakan fungsinya sebagai pelaksana operasi (manajer atau direksi) atau sebagai pengawas kegiatan operasi perusahaan (dewan komisaris). Sedangkan pemegang saham eksternal merupakan pemilik saham dari pihak luar perusahaan yang tidak terlibat di dalam struktur organisasi perusahaan. Struktur kepemilikan merupakan salah satu langkah untuk menekan biaya agensi atau agency cost karena antara pemegang saham dan manajemen sama-sama memiliki proporsi sendiri dalam perusahaan, dan akan meminimalisir terjadinya konflik keagenan (agency problem) karena adanya pembagian yang jelas.

¹⁴Wongso.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam struktur kepemilikan yaitu sebagai berikut :

1. Kepemilikan sebagian kecil saham perusahaan oleh manajemen mempengaruhi kecenderungan untuk memaksimalkan nilai pemegang saham dibanding sekedar mencapai tujuan perusahaan semata.
2. Kepemilikan yang terkonsentrasi member insentif kepada pemegang saham mayoritas untuk berpartisipasi secara aktif dalam perusahaan.
3. Identitas pemilik menentukan prioritas tujuan social perusahaan.
4. Maksimalisasi nilai pemegang saham, misalnya perusahaan milik pemerintah cenderung untuk mengikuti tujuan politik dibanding tujuan perusahaan.

Berdasarkan keterlibatan dalam manajemen perusahaan, struktur kepemilikan dalam perusahaan terbagi dalam kepemilikan manajerial (*insider*) dan kepemilikan eksternal (*outsider*).¹⁵

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah persentase kepemilikan saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris).

2. Kepemilikan Instiusional

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai proporsi kepemilikan saham pada akhir tahun yang dimiliki oleh lembaga seperti perbankan, asuransi atau institusi lain.¹⁶

F. Kepemilikan Manajerial dalam Agency Theory

Struktur kepemilikan suatu perusahaan merupakan pengelompokan atau pembagian kepemilikan perusahaan. Dalam struktur kepemilikan perusahaan dapat mencerminkan pengawasan terhadap manajemen untuk

¹⁵Sudarsi, 'DAMPAK KEPEMILIKAN MANAGERIAL, LARGE EXTERNAL SHAREHOLDERS TERHADAP STRUKTUR MODAL DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN'.

¹⁶Ahmad and Septriani.

mengurangi biaya keagenan.¹⁷Salah satu struktur kepemilikan perusahaan yaitu kepemilikan manajerial. Kepemilikan manajerial sangat bermanfaat dimana manajer juga ikut ambil bagian dalam kepemilikan saham perusahaan. Manajer kemudian akan berusaha lebih baik untuk meningkatkan nilai perusahaan sehingga manajer dapat menikmati sebagian keuntungan yang menjadi bagiannya tersebut.

Kepemilikan manajerial merupakan kepemilikan saham oleh manajemen. Alternatif yang dapat digunakan untuk mengurangi agency cost adalah memberikan kepada manajemen kepemilikan saham perusahaan. Dengan demikian manajer akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan (direktur dan komisaris).¹⁸ Adanya kepemilikan manajemen dalam sebuah perusahaan akan menimbulkan dugaan yang menarik bahwa nilai perusahaan meningkat sebagai akibat kepemilikan manajerial yang meningkat. Kepemilikan oleh manajerial yang besar akan efektif memonitoring aktivitas perusahaan. Adanya kepemilikan manajerial terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham lainnya sehingga permasalahan antara *agent* dan *principle* diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer juga sekaligus sebagaipemegang saham.

Proporsi saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Dengan peningkatan presentase kepemilikan, manajer termotivasi meningkatkan kinerja dan bertanggungjawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham. Selain itu

¹⁷Sudarsi, 'DAMPAK KEPEMILIKAN MANAGERIAL, LARGE EXTERNAL SHAREHOLDERS TERHADAP STRUKTUR MODAL DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN'.

¹⁸Ahmad and Septriani.

dampak dari tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah pertahanan (*entrenchmentproblems*) artinya tingkat kepemilikanmanajerial yang tinggi menyebabkan mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan, dimana pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk mengendalikan tindakan manajerial. Hal ini disebabkan karena manajerial memiliki hak voting yang tinggi atas kepemilikan.

SESI TANYA JAWAB

1. Kelompok 1

Apakah ada pengaruh struktur kepemilikan dalam waktu pelaporan keuangan suatu perusahaan?

Jawab : Menurut kelompok kami tidak ada pengaruh. Karena suatu perusahaan jika sudah memasuki waktu untuk menyajikan laporan keuangan perusahaan maka harus dilaksanakan. Sedangkan disini yang dimaksud dengan struktur kepemilikan adalah berbagai macam pola dan bentuk dari kepemilikan suatu perusahaan atau persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham internal dan pemegang saham eksternal¹⁹ atau besaran proporsi saham yang dimiliki principal maupun agen.

2. Kelompok 2

Bagaimana cara perusahaan mengatasi asimetri informasi?

Jawab : Asimetri informasi sendiri merupakan suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*).²⁰ Jadi dalam hal ini manajemen lebih tau kinerja serta prospek perusahaan dan biasanya agen melakukan tindakan yang diluar kesepakatan dengan principal yang hanya untuk kepentingan pribadi. Cara mengatasi asimetri informasi yaitu salah satunya menerapkan Good Corporate Governance. Yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political

¹⁹Wongso.

²⁰Lisa.

framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.²¹Jadi disini konsep GCG sendiri merupakan sebuah upaya untuk mengendalikan perilaku manajemen yang mementingkan dirinya sendiri dalam hal ini ketika timbul adanya asimetri informasi.

3. Kelompok 3

Bagaimana cara mengatasi agency problem yang timbul karena adanya asimetri informasi antara pemegang saham dengan manajerial? Apakah cukup dengan CGC atau ada cara lain?

Jawab : Selain CGC ada beberapa cara untuk mengurangi agency problem yaitu :²²

a. Meningkatkan kepentingan manajerial

Perusahaan meningkatkan kepemilikan manajerial untuk mensejajarkan kedudukan manajerial dengan pemegang saham sehingga bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham. Dengan peningkatan persentase kepemilikan,manajertermotivasimeningkatkankinerjadanbertanggung jawab meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

b. Kepemilikan institusional sebagai agen pengawas

Peningkatan kepemilikan institusional menyebabkan kinerja manajer diawasi secara optimal dan terhindar dari perilaku opportunistik.Dengan melibatkan kepemilikan institusional, manajer bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham sehingga mengurangi biaya keagenan.

c. Meningkatkan pendanaan melalui hutang

Penambahan hutang dalam struktur modal mengurangi penggunaan saham sehingga mengurangi biaya keagenan ekuitas. Perusahaan memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman dan membayar beban bunga secara periodik. Kondisi ini menyebabkan manajer

²¹Harbani Pasolong, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017).

²²Ahmad and Septriani.

bekerja keras untuk meningkatkan laba sehingga dapat memenuhi kewajiban dari penggunaan hutang. Sebagai konsekuensinya dari kebijakan ini perusahaan menghadapi biaya keagenan hutang dan resiko kebangkrutan

4. Kelompok 4

Apakah biaya agensi ditetapkan di awal atau waktu sudah ada konflik?

Jawab : Menurut kelompok kami ditetapkan di awal. Ketika principal dan agen membuat kontrak terkait kerjasama, maka akan merencanakan hal-hal dan juga anggaran terkait dengan operasional perusahaan. Seperti ketika perusahaan membuat cadangan kerugian piutang. Hal itu semestinya sudah ditetapkan di awal periode dan biasanya berdasarkan evaluasi dari periode sebelumnya berkaitan dengan piutang tak tertagih. Begitu pula dengan biaya agensi, salah satu jenis biaya agensi yaitu kerugian residual (residual loss) yang mungkin ada: risiko yang ditanggung atas hutang belum dilunasi dan biaya kebangkrutan. Besaran biaya keagenan ini dapat dibatasi dengan kualitas pengendalian oleh pemilik dan pihak ketiga yang menerima delegasinya (seperti bank) yang memantau tindakan manajer dari luar.²³

5. Kelompok 6

Masalah apa saja yang timbul akibat asimetri informasi? Apa yang akan terjadi jika asimetri informasi tersebut tidak diluruskan?

Jawab : Schiff dan Lewin (1970) dalam Hartono dan Riyanto (1997), menyatakan bahwa agent berada posisi yang mempunyai lebih banyak informasi mengenai kapasitas diri, lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan dibandingkan dengan *principal*. Dengan asumsi bahwa individu-individu bertindak untuk memaksimalkan kepentingan diri sendiri, maka dengan informasi asimetri yang dimilikinya akan mendorong *agent* untuk menyembunyikan beberapa informasi yang tidak

²³Hadiprajitno.

diketahui *principal*. Sehingga dalam kondisi semacam ini *principal* seringkali pada posisi yang tidak diuntungkan. Dalam penyajian informasi akuntansi, khususnya penyusunan laporan keuangan, *agent* juga memiliki informasi yang asimetris sehingga dapat lebih fleksibel mempengaruhi pelaporan keuangan untuk memaksimalkan kepentingannya. Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan ekonomi (IAI, 2002). Namun karena adanya kondisi yang asimetri, maka *agent* dapat mempengaruhi angka-angka akuntansi yang disajikan dalam laporan keuangan dengan cara melakukan manajemen laba.²⁴

6. Kelompok 7

Dalam Asimetri Informasi bisa memunculkan 2 permasalahan, moral hazard dan adverse selection. Apa maksud dari adverse selection itu? Dan apa yang harus audit administration lakukan untuk mengatasi adverse selection?

Jawab : Adverse selection adalah jenis asimetri informasi dalam mana satu pihak atau lebih yang melangsungkan atau akan melangsungkan suatu transaksi usaha atau transaksi usaha potensial memiliki informasi lebih atas pihak pihak lain. Adverse selection dapat terjadi karena beberapa orang seperti manajer perusahaan dan para pihak dalam (*insiders*) lainnya lebih mengetahui kondisi kini dan prospek ke depan suatu perusahaan daripada para investor luar.²⁵

Untuk mengatasi adverse selection inilah audit administrasi diharapkan untuk melaksanakan investigasi terhadap acara operasi suatu perusahaan, termasuk kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah

²⁴Lisa.

²⁵Alias Candra, 'Asimetri Informasi pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syari'ah Mandiri', 12.

ditentukan oleh manajemen, untuk mengetahui apakah acara operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

7. Kelompok 8

Bagaimana pengaruh Good Corporate Governance terhadap asimetri informasi?

Jawab : Good Corporate Governance yaitu suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran terhadap kemungkinan salah alokasi dan investasi, dan pencegahan korupsi baik yang secara politik maupun administrative menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha.²⁶ Ketika GCG diterapkan dengan baik maka perusahaan lebih terkontrol untuk melakukan pengawasan pada pihak internal, dengan adanya pengawasan yang baik diharapkan pihak internal tidak akan melakukan tindakan oportunitik karena biasanya suatu perusahaan terdapat kondisi asimetri informasi.

8. Kelompok 9

9. Kelompok 10

Apakah agency teory dapat menimbulkan ketidak simetrisan dalam mengelola perusahaan antara yang di inginkanshareholders dengan manajemen?

Jawab : *Agent* atau manajer sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan *Principal* atau shareholder. Situasi ini akan memicu munculnya suatu kondisi yang disebut sebagai asimetri informasi (*information asymmetry*). Yaitu suatu kondisi di mana ada ketidakseimbangan perolehan informasi antara pihak manajemen sebagai

²⁶Pasolong.

penyedia informasi (*prepaper*) dengan pihak pemegang saham dan *stakeholder* pada umumnya sebagai pengguna informasi (*user*).²⁷

10. Kelompok 11

11. Kelompok 12

Adakah pengaruh kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional terhadap manajemen laba?

Jawab : Kepemilikan saham oleh manajemen atau direksi dapat mengurangi konflik keagenan. Hal tersebut dikarenakan pihak yang menjalankan manajemen juga sebagai pemegang saham yang dimana pemegang saham akan menanggung hasil kerja dari manajemen yang berarti adalah dirinya sendiri. Hal tersebut menyebabkan semakin besar kepemilikan manajerial, maka manajemen akan semakin berhati-hati dalam menjalankan perusahaan karena juga akan mempengaruhi dirinya sendiri sebagai pemegang saham secara personal. Kepemilikan manajerial akan dapat mengurangi praktik manajemen laba. Melalui *monitoring* yang ketat oleh pihak kepemilikan institusional, maka kemungkinan terjadinya praktik manajemen laba dapat diperkecil. Semakin baik struktur kepemilikan (kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional), maka semakin menurun kemungkinan terjadinya manajemen laba.²⁸

12. Kelompok 13

Apa saja dampak adanya asimetri informasi?

²⁷Lisa.

²⁸Henry Sugiarto and Anastasia Njo, 'PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP EARNING MANAGEMENT DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL', *AGORA*, 6.2 (2018).

Jawab : Dalam hubungan keagenan, asimetri informasi terjadi karena prinsipal tidak memiliki informasi yang cukup tentang kinerja agen. Agen mempunyai lebih banyak informasi tentang perusahaan. Adanya asimetri informasi mendorong agen untuk menyajikan informasi yang tidak sebenarnya. Investor yang kurang informasi harus mengeluarkan biaya lebih untuk mendapatkan informasi mengenai investasinya, akibatnya investor cenderung akan menanam saham yang dimiliki dan mengakibatkan penurunan likuiditas saham. Penurunan likuiditas saham mengindikasikan tingginya risiko yang akan dihadapi investor, karena investor tidak memiliki kesempatan untuk mengkonversi saham berisiko yang dimiliki menjadi kas atau setara kas dengan mudah. Akibatnya tingkat pengembalian yang diharapkan investor meningkat dan berujung pada peningkatan *cost of equity capital* bagi perusahaan.²⁹

13. Kelompok 14

Bagaimana cara meminimalisir terjadinya agency problem?

Jawab : Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk mengatasi atau lebih tepatnya meminimalkan konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen, seperti yang diutarakan oleh Bathala(1994):

- A. Menyamakan kepentingan manajemen
- B. Pengawasan Good corporate governance (GCG)
- C. Pemberian reward dan punishment (penghargaan dan hukuman)
- D. Utang sebagai sumber pendanaan perusahaan
- E. Intervensi langsung oleh pemegang saham
- F. Meningkatkan kepemilikan saham oleh institusi

14. Kelompok 15

²⁹Sofia Prima Dewi and Jeffry Setiady Chandra, 'PENGARUH PENGUNGKAPAN SUKARELA, ASIMETRI INFORMASI, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP COST OF EQUITY CAPITAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 18.1 (2016).

Apa saja bentuk hukuman yang diberikan kepada manajemen yang menyimpang atau merugikan pihak principal atau pemegang saham?

Jawab : Setiap perusahaan pastinya membuat perjanjian tentang kesepakatan bersama. Dalam hal ini jika manajemen melakukan tindakan yang menyimpang maka akan ada punishment. Seperti pada hubungan kerja sama biasa, punishment yang dilakukan oleh manajemen tergantung pada tingkat kefatalan yang dibuat. Seperti diberikan sp satu dan kesekian, jika kesalahan yang dilakukan sangat fatal maka bias jadi terjadi pemutusan hubungan kerja.

15. Kelompok 16

Apakah ada pihak lain (pihak ketiga) selain principal dan agen yang memiliki agency problem?

Jawab : Tentu ada, contoh perbankan syariah. Teori agensi mendominasi tata kelola perusahaan dimana tata kelola yang baik sering ditafsirkan pada orientasi maksimalisasi nilai. Dengan berfokus pada maksimalisasi nilai, berarti berorientasi pada masalah agensi yang sering digambarkan oleh keuntungan dan kepentingan pribadi. Secara khusus, Bank Syariah diwajibkan untuk beroperasi dengan cara yang sesuai Syariah selain memaksimalkan kekayaan pemegang saham mereka, di sini letak risiko oportunistik dari para pengelola Bank Syariah untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan deposan. Selain itu, Bank Syariah memiliki insentif untuk mengambil risiko berlebih, dengan mengalokasikan simpanan dalam aset dengan risiko tinggi (*excessive risk taking*). Ketidakhati-hatian bank dalam menyalurkan dana pihak ketiga dapat dikategorikan sebagai tindakan *moral hazard*. Kontrak berbasis *profit loss sharing (PLS)* memiliki tingkat *adverse selection* dan *moral hazard* yang tinggi. *Adverse selection* dan *moral hazard* melekat pada kontrak bagi hasil sebagai bentuk permasalahan

atas ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*) dalam hubungan antar pemilik modal (*sahibulmal/prinsipal*) dan pelaku usaha (*mudharib/agen*). Dalam hal ini deposan menghadapi risiko kegagalan pengelolaan dan oleh bank yang akan meningkatkan pembiayaan bermasalah. Selain itu kedudukan pemberi pinjaman/bank juga berada dalam posisi penerima risiko atas usaha yang dilakukan pihak peminjam dana atau agen (Ibrahim dan Ragimun 2010) dan akan berdampak pada kualitas pembiayaan, karena setiap pembiayaan yang disalurkan memiliki risiko pembiayaan yang tinggi. Masalah keagenan seperti *moral hazard* dan *adverse selection* mengakibatkan tingginya NPF (*non-performing financing*). Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan Bank Syariah semakin buruk akibat adanya masalah keagenan. Pembiayaan bermasalah akan berakibat pada kerugian tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan yang tidak dapat diterima. Karena berbagai sebab, debitur mungkin saja menjadi tidak memenuhi kewajiban nyakepada bank (terjadi *moral hazard* oleh debitur). Artinya, bank kehilangan kesempatan mendapat penerimaan yang sebelumnya sudah diperkirakan, yang berakibat pada penurunan pendapatan secara total.³⁰

16. Kelompok 17

Apa menariknya hubungan agen dan principal sampai harus ada teori agensi? Itukan hanya hubungan kerjasama semata. Lalu adakah tujuan utama dan manfaat dari adanya teori agensi ini?

Jawab : Agency theory terfokus pada dua individu pihak yaitu prinsipal dan agen. Prinsipal didefinisikan

³⁰Kery Utami, Budi Purwanto, and Tubagus Nur Ahmad Maulana, 'Masalah Keagenan dalam Kontrak Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia', *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 9.3 (2019), 137–49 <<https://doi.org/10.29244/jmo.v9i3.28225>>.

sebagai pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yang disebut agen, untuk dapat bertindak atas nama agen tersebut. Agen, sebagai pihak yang diberi amanah untuk menjalankan dan dari pihak pemilik (prinsipal) harus mempertanggungjawabkan apa yang telah di amanahkan. Di lain pihak prinsipal sebagai pihak pemberi amanah akan memberikan insentif kepada agen berbagai macam fasilitas baik finansial maupun non finansial. Permasalahan timbul ketika kedua belah pihak mempunyai persepsi dan sikap yang berbeda dalam hal pemberian informasi yang akan digunakan oleh prinsipal untuk memberikan insentif kepada agen. Agency theory berasal dari asumsi bahwa individu memaksimalkan tingkat kepuasannya yang diharapkan melalui kemampuan sumber dayanya yang memadai dan inovasinya dalam bertindak sehingga pengungkapan yang dikeluarkan berdasarkan acuan pada agency theory merupakan bagian dari manfaat yang diharapkan oleh individu dengan suatu tindakan tertentu. Agency theory memberikan peranan penting akuntansidalam menyediakan informasi setelah suatu kejadian atau keputusan, yang mana seorang agen melaporkan kepada prinsipal tentang kejadian-kejadian yang muncul dalam periode yang telah lalu. Agency theory mempunyai tujuan yaitu³¹:

- a. Untuk meningkatkan kemampuan individu (baik prinsipal maupun agen) dalam mengevaluasi lingkungan dimana suatu keputusan harus diambil.
- b. Untuk mengevaluasi hasil dari keputusan yang telah diambil untuk memudahkan

³¹Mariska Dewi Anggraeni, 'AGENCY THEORY DALAM PERSPEKTIF ISLAM', 9 (2011), 13.

pengalokasian hasil antar prinsipal dan agensi sesuai dengan persetujuan dan kontrak kerja.

17. Kelompok 18

Adakah contoh perusahaan yang mengalami agency problem dan bagaimana cara mengatasinya?

Jawab : Krisis keuangan di AS terjadi di antaranya karena ulah para bankir yang melakukan investasi berisiko. Baik dengan memberikan pinjaman perumahan kepada orang yang tidak mampu membayar (sub prime mortgage) atau membeli surat berharga beracun karena tergoda iming-iming keuntungan tinggi (CDS dan CDO). Satu per satu bank-bank di AS mulai merasakan dampak dari tindakannya ketika suku bunga mulai merambat naik. Kredit perumahan yang memakai pola ARM (adjusted rate mortgage) banyak yang tidak terbayar. Seperti efek domino tren ini menjalar luas ke setiap lembaga keuangan yang terekspos dengan CDS dan CDO. Akibatnya, bank-bank besar menampilkan laporan keuangan dengan kerugian besar dan harus meminta bantuan bank sentral dan pemerintah agar dapat terus bertahan. Sejak era Bush sampai Obama pemerintah AS telah mengeluarkan dana bail out ratusan miliar dolar untuk mencegah hancurnya sistem keuangan di negara adidaya itu. Meskipun guncangan ini terjadi di sektor keuangan namun karena perekonomian AS sangat tergantung dengan industri keuangan maka industri-industri lain pun seperti otomotif dan surat kabar mengalami kerugian besar akibat melemahnya permintaan sehingga memaksa mereka melakukan PHK karyawan dan penutupan pabrik. Menurut literatur keuangan masalah yang dipaparkan di atas dapat dilihat dari pendekatan agency problem (agency theory). Agency problem merupakan masalah klasik yang terjadi di perusahaan. Agent (manajemen) membuat kebijakan yang tidak memaksimalkan keuntungan pemegang saham (pemilik/principal). Hal ini terjadi karena adanya ketidaksamaan informasi yang dimiliki agent dan principal. Sehingga, terkadang agent membuat

kebijakan yang menguntungkan dirinya sendiri. Biayanya harus ditanggung pemilik. Seperti: kantor yang mewah, jet perusahaan, limosin, dan lain-lain. Untuk mencegah, penyalahgunaan oleh manajemen, pemegang saham dapat mengambil beberapa pendekatan yang dapat meminimalkan agency problem tersebut. Di antara pendekatan atau tindakan yang dapat diambil adalah, melakukan audit terhadap laporan keuangan, menempatkan beberapa investor menjadi dewan direksi (Brigham dan Daves, 2004). Selain itu perlu juga dirancang struktur kompensasi yang menjamin manajemen dapat mengambil kebijakan yang menguntungkan pemegang saham. Ini tercermin di kinerja jangka panjang harga pasar saham. Melihat kondisi industri perbankan AS saat ini agency problem yang terjadi adalah kompleks. Agency problem tidak hanya terjadi antara manajemen dengan pemegang saham, atau manajemen dengan kreditor. Namun, juga bertambah menjadi manajemen dengan pemerintah dan masyarakat. Khusus untuk agency problem yang terakhir manajemen bank tengah disorot karena membagikan bonus pada para eksekutifnya meskipun prestasinya buruk dan menerima dana bail out. Kebijakan ini dianggap publik sangat tidak masuk akal mengingat bonus seharusnya diberikan atas dasar prestasi dan bukan semata-mata karena alasan sudah tercantum dalam kontrak kerja atau untuk mencegah para staf mereka pindah ke perusahaan lain. Selain itu perilaku pembagian bonus itu juga dianggap tidak adil. Di tengah kondisi resesi yang sedang melanda AS para bankir berpesta pora dengan uang pembayar pajak. Sementara PHK terjadi di mana-mana dan tingkat pengangguran agregat mencapai 10%. Selain masalah pembagian bonus hal lain yang juga tengah disorot adalah keengganan bank untuk menyalurkan kredit untuk membantu pemulihan ekonomi AS. Setelah melakukan blunder yang menyebabkan krisis industri perbankan tidak menunjukkan keberpihakan pada usaha pemulihan ekonomi. Meskipun begitu bank sebenarnya menghadapi dilema. Untuk pemulihan ekonomi memang diperlukan dukungan dana dari sektor perbankan. Namun, bank juga harus berhati-hati untuk

memberikan kredit di tengah situasi resesi dan ketidakpastian yang tinggi. Saat ini masyarakat AS masih menunggu perkembangan dari drama ini. Pemerintah dan senat tengah menggodok aturan perbankan yang lebih ketat untuk mencegah krisis serupa terjadi di kemudian hari. Namun, bank-bank besar ternyata menolak sebagian rancangan aturan itu dan melobi parlemen untuk melonggarkan aturan. Nampaknya agency problem di industri perbankan tidak akan berkurang meskipun sudah banyak korban dan kegetiran yang dirasakan dari kebijakan manajemen perbankan yang salah.³² Cara mengatasi agency problem antara lain, menerapkan GCG, meningkatkan kepemilikan manajerial, kebijakan utang maupun kebijakan deviden.

18. Kelompok 19

Apabila ada kecurigaan (agency problem) akan menimbulkan biaya agensi, apakah tidak lebih baik jika keduanya putus kontrak saja? Apakah bias putus kontrak?

Jawab : memang benar bahwa untuk mengatasi serta mengurangi adanya agency problem dibutuhkan agency cost. Dalam hal pemutusan kontrak kerja, biasanya tidak semudah itu. Karena apabila ada keterlibatan dengan banyak pihak akan menimbulkan efek paralel. Akan tetapi jika kesalahan yang dilakukan fatal bias saja terjadi putus kontrak daripada efek yang ditimbulkan lebih besar. Menurut UU No. 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 62 berbunyi :

“Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang

ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja jabuk karena

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan

³²<https://news.detik.com/opini/d-1273788/agency-problem-di-industri-perbankan->

kerjadiwajibkanmembayargantirugikepadapihaklainnyasebesarupahpekerja /buruhsampai bataswaktuberakhirnyajangkawaktuperjanjiankerja.”³³

19. Kelompok 20

Bagaimana cara menghindari atau mencegah munculnya agency problem?

Jawab :Ada beberapa cara yang bisa digunakan untuk menghindari atau lebih tepatnya mencegah konflik kepentingan yang terjadi antara prinsipal dan agen, seperti yang diutarakan oleh Bathala(1994):

- A. Menyamakan kepentingan manajemen
- B. Pengawasan Good corporate governance (GCG)
- C. Pemberian reward dan punishment (penghargaan dan hukuman)
- D. Utang sebagai sumber pendanaan perusahaan
- E. Intervensi langsung oleh pemegang saham
- F. Meningkatkan kepemilikan saham oleh institusi

20. Kelompok 21

Bagaimana dampak dari tingkat kepemilikan manajerial?

Jawab : Struktur kepemilikan perusahaan merupakan pengelompokan atau pembagian kepemilikan perusahaan. Berdasarkan keterlibatan dalam manajemen perusahaan, struktur kepemilikan dalam perusahaan terbagi dalam kepemilikan manajerial (insider) dan kepemilikan eksternal (outsider). Dalam struktur kepemilikan perusahaan, dapat mencerminkan pengawasan pemilik terhadap manajemen untuk mengurangi biaya keagenan. Grosman dan Hart (1992) menyatakan bahwa kepemilikan managerial yang tinggi dan hutang yang terlalu tinggi juga berdampak buruk terhadap perusahaan. Tingkat kepemilikan manajerial yang terlalu tinggi dapat menimbulkan masalah pertahanan (entrenchment problems) artinya tingkat kepemilikan manajerial yang tinggi menyebabkan mereka memiliki posisi yang kuat untuk melakukan kontrol terhadap perusahaan, dimana pihak pemegang saham eksternal akan mengalami kesulitan untuk

³³ UU RI Nomor 13 tahun 2003

mengendalikan tindakan manajerial. Hal ini disebabkan karena manajerial memiliki hak voting yang tinggi atas kepemilikan.³⁴

21. Kelompok 22

Contoh dari pembagian yang jelas itu seperti apa dalam struktur kepemilikan?

Jawab : Pembagian yang jelas antara pemilik dan manajemen sama – sama memiliki proporsi sendiri dalam perusahaan, contohnya pemetaan pembagian antara kekuasaan dan pengawasan pada suatu perusahaan, dimana antara manajemen dan pemegang saham memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam kekuasaan dan pengawasan.

22. Kelompok 23

Mengenai biaya audit untuk auditor dan Dewan pengawas yang ada di perusahaan, apakah termasuk dalam agency cost?

Jawab :

Iya termasuk, Michael J dan William M (1976) mengatakan setidaknya ada 3 jenis agency cost, yaitu³⁵:

- A. Biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi aktivitas manajerial, contohnya biaya audit.
- B. Biaya yang dikeluarkan untuk membatasi tindakan manajemen yang tidak diinginkan. Contohnya menunjuk anggota dari luar untuk dewan direksi atau hierarki manajemen.
- C. Biaya peluang (opportunity cost) ketika suara pemegang saham dibatasi.

23. Kelompok 24

³⁴Sri Sudarsi, 'DAMPAK KEPEMILIKAN MANAGERIAL, LARGE EXTERNAL SHAREHOLDERS TERHADAP STRUKTUR MODAL DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN', 15.1 (2008), 16.

³⁵'Pelajari Permasalahan Agency Cost & Tips Mendapatkan Perhitungannya Dengan Baik', *Jurnal Blog*, 2018 <<https://www.jurnal.id/blog/2018-semua-hal-tentang-agency-cost-dan-tips-mendapatkan-perhitungannya-dengan-baik/>> [accessed 14 March 2020].

Apakah asimetri informasi terjadi juga pada perusahaan yang menjalankan usahanya menggunakan prinsip syariah?

Jawab : Sebuah kerjasama atau hubungan keagenan pasti ada konflik keagenan sekecil apapun. Asimetri informasi menjadi masalah besar dalam perbankan syariah. Asimetri informasi merupakan suatu keadaan dimana amanah memiliki akses informasi atas prospek perusahaan

yang tidak dimiliki oleh pihak luar perusahaan (McDonald, 1994:23). Masalah ketidaksetaraan informasi menyebabkan dispersi masalah ikut serius dunia perbankan (Thadden, 2001: 2)

dengan munculnya beragam kasus perbankan syariah. Asimetri informasi dapat diantisipasi

dan diminimalkan dengan mengungkapkan informasi yang lebih berkualitas.

Munculnya kasus-

kasus perbankan disebabkan oleh pengungkapan informasi yang berkualitas buruk.³⁶ Contoh pertama seperti dalam perjanjian akad penyimpanan uang antar bank dengan pemilik uang, jika dicermati pasal per pasal cenderung mengatur kewajiban nasabah, sedangkan bank syariah selalu berdalih akad, sehingga akad selalu menjadi jatah bank tanpa

memperhatikan kewajiban bank untuk menjelaskan

setiap konsekuensi dan tatanan akad meskipun hal ini juga terjadi pada bank konvensional. Contoh kedua yaitu pada produk

pembiayaan bank syariah. Pasal-

pasal dalam akad pembiayaan juga mengikat tugas konsekuensi

keuangan pembiayaan bagi penerima

pembiayaan atau "kreditur". Ditinjau dari substansi

keuangan penerima pembiayaan adalah samadengan

³⁶Slamet Haryono, 'Asimetri informasi dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia', *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15.1 (2016), 103 <<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.103-118>>.

terminologi kredit pada bank konvensional. Akad-akad seperti juga bank konvensional cenderung mengamankan keuntungan bagi bank.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Teori keagenan atau *agency theory* mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai principal dan manajemen sebagai agen. Manajemen merupakan pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk bekerja demi kepentingan pemegang saham. Oleh karena itu, pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan semua pekerjaannya kepada pemegang saham. Dalam hubungan keagenan sering terjadi konflik keagenan yang disebabkan oleh beberapa factor seperti adanya asimetri informasi. Untuk mengurangi konflik keagenan maka diperlukan biaya keagenan untuk melakukan pengawasan. Jika konflik keagenan dalam perusahaan yang terjadi itu besar, maka diperlukan biaya keagenan yang besar pula. Salah satu cara untuk menekan biaya keagenan yaitu pada struktur kepemilikan perusahaan, karena antara pemegang saham dan manajemen sama-sama memiliki proporsi sendiri dalam perusahaan, dan akan meminimalisir terjadinya konflik keagenan (*agency problem*) karena adanya pembagian yang jelas. Salah satu struktur kepemilikan yaitu kepemilikan manajerial yang mempunyai dampak ke kinerja perusahaan dilihat dari perspektif teori keagenan.

B. Saran

Kajian tentang teori keagenan seharusnya menjadi pembelajaran bahwa seharusnya diterapkan dalam perusahaan agar terciptanya kinerja perusahaan yang lebih baik dan konflik keagenan sepatutnya diminimalisir. Bagipeneliti selanjutnya, pembahasan tentang teori keagenan agar dapat diperluas atau dapat ditambah factor-faktor lain yang dapat berpengaruh dalam perspektif teori keagenan seperti sumber referensi dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Uzaimi, 'TEORI KEAGENAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 1.1 (2017), 71–78
<<https://doi.org/10.31629/jiafi.v1i1.1240>>
- Ahmad, Afridian Wirahadi, and Yossi Septriani, 'Konflik Keagenan: Tinjauan Teoritis dan Cara Mengurangnya', *Jurnal Akuntansi*, 3, 10
- Anggraeni, Mariska Dewi, 'AGENCY THEORY DALAM PERSPEKTIF ISLAM', 9 (2011), 13
- Candra, Alias, 'Asimetri Informasi pada Pembiayaan Pemilikan Rumah di Bank Syari'ah Mandiri', 12
- David, Sukardi Kodrat, and Herdinata Christian, *Manajemen Keuangan Based on Empirical Research*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009)
- Fadjrih Asyik, Nur, 'PERSPEKTIF AGENCY THEORY: PENGARUH INFORMASI ASIMETRI TERHADAP MANAJEMEN LABA (Menggunakan Pendekatan Agency Framework)', *EKUITAS (Jurnal Ekonomi dan Keuangan)*, 4.1 (2016), 29
<<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2000.v4.i1.1898>>
- Hadiprajitno, P.B., 'Struktur Kepemilikan, Mekanisme Tata Kelola Perusahaan, Dan Biaya Keagenan Di Indonesia', *Jurnal Akuntansi & Auditing*, 9.2 (2013), 97–127
- Haryono, Slamet, 'Asimetri informasi dalam transaksi perbankan syariah di Indonesia', *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, 15.1 (2016), 103 <<https://doi.org/10.18326/ijtihad.v15i1.103-118>>

- Lisa, Oyong, 'ASIMETRI INFORMASI DAN MANAJEMEN LABA: SUATU TINJAUAN DALAM HUBUNGAN KEAGENAN', 2.1 (2012), 8
- Liviani, Shiela, Putu Anom Mahadwartha, and Liliana Inggrit Wijaya, 'UJI MODEL KESEIMBANGAN TEORI KEAGENAN: PENGARUH KEBIJAKAN UTANG DAN KEBIJAKAN DIVIDEN TERHADAP KEPEMILIKAN MANAJERIAL', 11.1 (2016), 19
- Muntahanah, 'Manajemen Konflik Agency Kaitannya Dengan Nilai Perusahaan'
- Pasolong, Harbani, *Teori Administrasi Publik* (Bandung: CV. Alfabeta, 2017)
- 'Pelajari Permasalahan Agency Cost & Tips Mendapatkan Perhitungannya Dengan Baik', *Jurnal Blog*, 2018 <<https://www.jurnal.id/blog/2018-semua-hal-tentang-agency-cost-dan-tips-mendapatkan-perhitungannya-dengan-baik/>> [accessed 14 March 2020]
- Prima Dewi, Sofia, and Jeffry Setiady Chandra, 'PENGARUH PENGUNGKAPAN SUKARELA, ASIMETRI INFORMASI, DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP COST OF EQUITY CAPITAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR', *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 18.1 (2016)
- Sudarsi, Sri, 'DAMPAK KEPEMILIKAN MANAGERIAL, LARGE EXTERNAL SHAREHOLDERS TERHADAP STRUKTUR MODAL DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN', 15.1 (2008), 16
- , 'DAMPAK KEPEMILIKAN MANAGERIAL, LARGE EXTERNAL SHAREHOLDERS TERHADAP STRUKTUR MODAL DALAM PERSPEKTIF TEORI KEAGENAN', 15.1 (2008), 16
- Sugiarto, Henry, and Anastasia Njo, 'PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN STRUKTUR KEPEMILIKAN TERHADAP EARNING MANAGEMENT DENGAN UKURAN PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL KONTROL', *AGORA*, 6.2 (2018)
- Susilawati, R Anastasia Endang, 'PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG PERUSAHAAN':, 17
- Utami, Kery, Budi Purwanto, and Tubagus Nur Ahmad Maulana, 'Masalah Keagenan dalam Kontrak Bagi Hasil Perbankan Syariah di Indonesia', *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, 9.3 (2019), 137–49 <<https://doi.org/10.29244/jmo.v9i3.28225>>
- Wongso, Amanda, 'PENGARUH KEBIJAKAN DIVIDEN, STRUKTUR KEPEMILIKAN, DAN KEBIJAKAN HUTANG TERHADAP NILAI

PERUSAHAAN DALAM PERSPEKTIF TEORI AGENSI DAN TEORI SIGNALING', 6

Zogning, Félix, 'Agency Theory: A Critical Review', *European Journal of Business and Management*, 2017, 8